

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2016

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah 2016

ISBN : 978-602-662-104-7

No. Publikasi : 82020.1714

Katalog : 7102025.8202

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xii + 77 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Sumber Ilustrasi :

-

Diterbitkan oleh :

© BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh :

CV.Tara Taro

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



<http://haltengkab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan melakukan pembangunan secara merata dan adil agar tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah antara lain adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB) khusus bahan bangunan/konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. IKK sangat ringkas, namun data ini dapat menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi di kabupaten/kota masing-masing.

Weda, Oktober 2017

Kepala BPS

Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, S.ST

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang	3
Tujuan	4
II. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	
Konsep Pemikiran	7
Metode Penghitungan IKK	8
IKK 2016	10
III. ANALISIS IKK	
Profil Kabupaten Halmahera Tengah	15
IKK Kabupaten Halmahera Tengah	19
IV. LAMPIRAN	
Penghitungan diagram timbang IKK 2016.....	27
Kuesioner IKK 2016	40

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Nama Desa yang Terdapat di Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016.....	18
Tabel 2. IKK Kabupaten/Kota yang Ada di Sekitar Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016.....	20
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2016	63
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2016.....	65

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara, tahun 2016	21
Gambar 2. Grafik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara, tahun 2016	22
Gambar 3. Bagan hubungan antara proyek, system dan komponen	34
Gambar 4. Bagan Proses penghitungan IKK 2016 secara keseluruhan beserta dengan penggunaan penimbang	39

<http://haltengkab.bps.go.id>

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	: ...
Tidak ada atau nol	: —
Data dapat diabaikan	: 0
Tanda decimal	: ,
Data tidak dapat ditampilkan	: NA
Angka perkiraan	: ^e
Angka sementara	: ^x
Angka sangat sementara	: ^{xx}
Angka diperbaiki	: ^r

2. SATUAN

barel	: 158,99 liter = 1/6,2898 m ³
hektar (ha)	: 10 000 m ²
kilometer (km)	: 1 000 meter (m)
knot	: 1,8523 km/jam
kuintal	: 100 kg
KWh	: 1 000 Watt <i>hour</i>
MWh	: 1 000 KWh
liter (untuk beras)	: 0,80 kg
ons	: 28,31 gram
ton	: 1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka.

<http://haltengkab.bps.go.id>

1 PENDAHULUAN

<http://haltengkab.bps.go.id>

<http://haltengkab.bps.go.id>

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah (Otda) yang diundangkan oleh pemerintah sejak tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrument transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi

PENDAHULUAN

Umum (DAU) disamping Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Luas Wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukannya penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi tahun 2016 adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2017 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum untuk pengalokasian 2017

<http://haltengkab.bps.go.id>

2 IKK

<http://haltengkab.bps.go.id>

<http://haltengkab.bps.go.id>

2.1 Konsep Pemikiran

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis, karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metoda penghitungan, yaitu pertama dengan pendekatan input, dan kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metoda ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan *output* dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada pendekatan *output* kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk *manajemen cost* dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan *manajemen cost* dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi dibawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity (BoQ)* atau Analisis Harga Satuan satu proyek yang sudah selesai. Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

2.2 Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK 2016 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing system dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/ kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$NK = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

Dengan :

NK = Nilai Komponen

p_k = Harga Material/upah/sewa alat ke-k

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa alat ke-k

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP system dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut :

$$\ln NK = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

NK = Nilai Komponen

C_i = Dummy kab/ kota

P_j = Dummy komponen dalam suatu system

α_i dan β_j = Koefisien Regresi

PPP Sistem = $\exp(\alpha_i)$

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan menggunakan metode rata-rata geometric dengan rumus sebagai berikut :

$$PPP_{bangunan} = (\prod_{i=1}^n PPP_{sistem_i})^{\frac{1}{n}}$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometric tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut :

$$IKK_{kab/kota} = (\prod_{i=1}^n PPP_{bangunan_i})^{bobot_i}$$

2.3 IKK 2016

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah *BoQ* tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan *BoQ* 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan *BoQ* terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012.

Sedangkan IKK tahun 2016 menggunakan penimbang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating *BoQ* sampai tahun 2015.

IKK tahun 2016 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah tenaga kerja yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu akhir Juli 2015, Oktober 2015, Januari 2016, dan April 2016. Seperti halnya IKK tahun 2015, IKK tahun 2016 menggunakan 4 (empat) periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

3 ANALISIS IKK

<http://haltengkab.bps.go.id>

<http://haltengkab.bps.go.id>

3.1 Profil Kabupaten Halmahera Tengah

Kabupaten Halmahera Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang mempunyai ibukota di Weda. Secara geografis letak Kabupaten Halmahera Tengah di antara $0^{\circ}45'$ Lintang Utara – $0^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan $127^{\circ}45'$ – $129^{\circ}26'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah tercatat $8.381,48 \text{ km}^2$ dengan luas daratan sebesar $2.276,83 \text{ km}^2$ dan lautan sebesar $6.104,65 \text{ km}^2$. Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari 10 kecamatan, 63 desa.

Kabupaten Halmahera Tengah berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur di sebelah utara, Provinsi Papua Barat di sebelah timur, Kota Tidore Kepulauan di sebelah barat dan Kabupaten Halmahera Selatan di sebelah selatan. Selain itu, Halmahera Tengah berbatasan juga dengan Teluk Buli dan Teluk Weda yang menjadikan hasil perikanan sebagai kandungan alam potensial dan layak menjadi andalan.

Selain potensial dengan hasil perikanan, sejak tahun 2011 di Kabupaten Halmahera Tengah ada tempat wisata *Weda Resort* yang terletak di Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah. Tempat wisata yang sudah ada sejak 2011 ini menawarkan *diving* dan *bird watching* sebagai produk andalannya ini sangat potensial untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga bisa meningkatkan sumbangan dari sektor pariwisata terhadap total kegiatan ekonomi di Halmahera Tengah.

Kabupaten Halmahera Tengah berdiri sejak tahun 1968 sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. Odes 25/I/8 tahun 1968 dengan maksud dikembangkan untuk dijadikan daerah tingkat II yang otonom. Kemudian direstui dengan Skep Mendagri tgl 15 April 1969 No. Pemda 2/I/33. Dengan demikian secara *de facto* sejak tahun 1969, Kabupaten Halmahera Tengah telah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sejajar dengan daerah tingkat II lainnya di Provinsi Maluku.

Pada tahun 1990 daerah Halmahera Tengah dinyatakan sebagai daerah Kabupaten penuh. Dengan menyesuaikan pada perkembangan waktu dan tuntutan kondisi sosial masyarakat, maka pada tahun 2003, dengan UU RI No. 1 tahun 2003 Kabupaten Halmahera Tengah dimekarkan menjadi tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Kabupaten Induk kemudian Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan.

Setelah pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2005, wilayah Kabupaten Halmahera Tengah menjadi 6 (enam) Kecamatan, yaitu: Weda, Weda Utara, Weda Selatan, Patani, Patani Utara, dan Pulau Gebe. Ibukota kabupaten dipindahkan dari Tidore ke salah satu kecamatan tersebut yang saat ini menjadi Kota Weda.

Perkembangan administrasi pemerintahan terus mengalami perkembangan untuk lebih mendekatkan masyarakat pada pelayanan

publik. Adapun jumlah dan nama desa di setiap kecamatan berdasarkan kondisi sampai dengan tahun 2016 tercantum pada tabel berikut.

<http://haltengkab.bps.go.id>

Tabel 1. Nama Desa yang Terdapat di Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016

Kecamatan	Desa	
(1)	(2)	
1. Weda	1. Nusliko 2. Were 3. Nurweda 4. Fidy Jaya	5. Sidanga 6. Wedana 7. Goeng
2. Weda Selatan	1. Kluting Jaya 2. Wairoro Indah 3. Tilope 4. Sosowomo	5. Loleo 6. Sumber Sari 7. Lembah Asri 8. Air Salobar
3. Weda Utara	1. Gemaf 2. Sagea 3. Fritu	4. Waleh 5. Kiya 6. UPT Waleh
4. Weda Tengah	1. Kobe 2. Sawai Itepo 3. Lelilef Waibulan 4. Lelilef Sawai	5. Woekop 6. Woejerana 7. Kulo Jaya
5. Weda Timur	1. Yeke 2. Messa	3. Dotte 4. Kotalo
6. Pulau Gebe	1. Umera 2. Sanafi 3. Kacepi 4. Kapaleo	5. Umiyal 6. Sanaf Kacepo 7. Elfanun 8. Yam
7. Patani	1. Yeisowo 2. Wailegi 3. Kipai	4. Yondeliu 5. Baka Jaya
8. Patani Utara	1. Gemia 2. Tepeleo 3. Bilifitu	4. Tepeleo Batu Dua 5. Pantura Jaya 6. Maliforo
9. Patani Barat	1. Bobane Indah 2. Banemo 3. Bobane Jaya	4. Moreala 5. Sibenpopo
10. Patani Timur	1. Peniti 2. Masure 3. Sakam	4. Pallo 5. Damuli 6. Nursifa

Ket : Tulisan yang dicetak tebal adalah ibukota kecamatan

3.2 IKK Kabupaten Halmahera Tengah

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan rata-rata nasional (IKK = 100).

Secara umum, nilai IKK di wilayah timur Indonesia lebih tinggi daripada nilai IKK di wilayah barat Indonesia. Keadaan geografis yang luas, akses antar wilayah yang sulit, dan sarana prasarana transportasi yang belum maksimal adalah beberapa faktor pendukung tingginya nilai IKK di wilayah tersebut.

IKK Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016 menduduki peringkat ke-3 tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 127,99. IKK tertinggi pada level nasional adalah Provinsi Papua dengan nilai IKK sebesar 239,98 dan terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai IKK 93,70.

IKK Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 adalah 126,31. Kabupaten Halmahera Tengah menempati urutan ke-enam nilai IKK tertinggi pada level provinsi. IKK terendah pada level provinsi adalah Kabupaten Halmahera Selatan (111,30). Pada level nasional, IKK tertinggi adalah Kabupaten Puncak dengan nilai sebesar 454,67 dan terendah adalah Kabupaten Lombok Utara dengan nilai sebesar 81,59. Berikut IKK Kabupaten Halmahera Tengah dan sekitarnya:

Tabel 2. IKK Kabupaten/Kota yang Ada di Sekitar Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	IKK Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
8202	HALMAHERA TENGAH	126,31
8272	TIDORE KEPULAUAN	128,11
8206	HALMAHERA TIMUR	128,18
8271	KOTA TERNATE	127,35
8204	HALMAHERA SELATAN	111,30

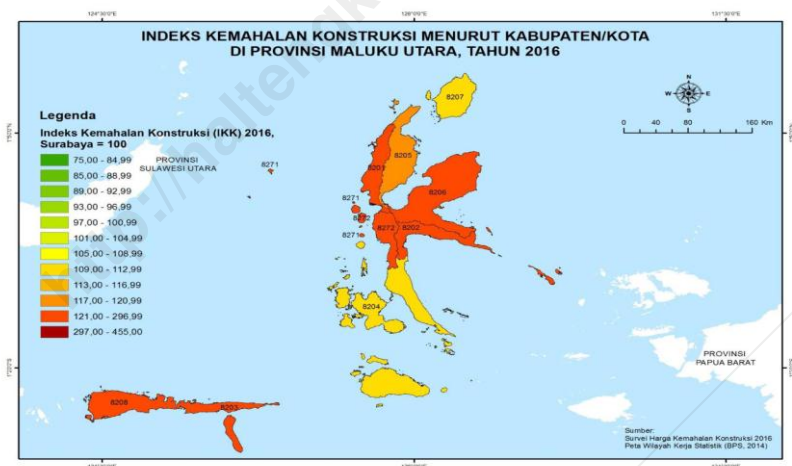
Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016

Secara umum pada tahun 2016, IKK Kabupaten Halmahera Tengah yakni sebesar 126,31 menempati urutan ke-dua terendah dibandingkan dengan IKK di kabupaten sekitar Halmahera Tengah. Secara implisit hal ini menggambarkan bahwa secara umum harga barang-barang konstruksi yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di Kabupaten Halmahera Tengah termasuk rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, bagi usaha sektor perdagangan bahan konstruksi serta bagi pelaku usaha sektor konstruksi di Kabupaten Halmahera Tengah.

Banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dan jasa di suatu wilayah. Selain sisi permintaan dan penawaran, juga terdapat faktor lain seperti jumlah pedagang besar di suatu kota, kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi, jarak ke tempat asal barang, dan lain-lain.

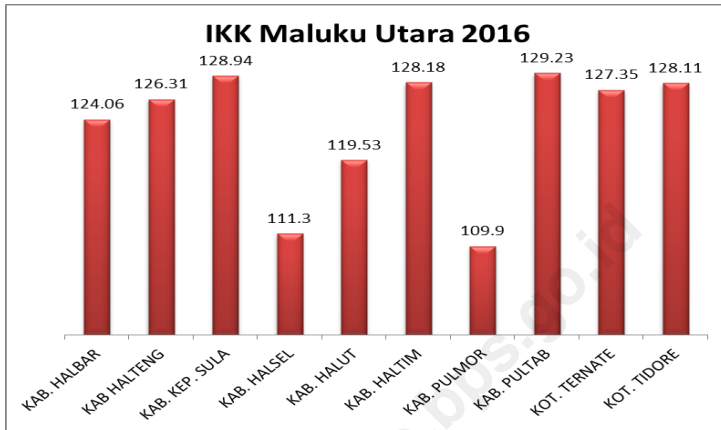
Paket komoditas dapat dikategorikan menjadi barang alam/natural dan barang pabrikan. Dilihat dari harga rata-rata Provinsi Maluku Utara harga barang natural seperti pasir, batu, papan, balok, dan batu split Kabupaten Halmahera Tengah relatif murah sedangkan untuk barang pabrikan seperti tripleks, cat, aspal, kaca, dan sebagainya relatif masih mahal. Barang pabrikan relatif masih mahal karena berasal dari luar Maluku Utara, yaitu Surabaya, Manado, dan Makassar.

Gambar 1. Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara, tahun 2016



Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016

Gambar 2. Grafik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2016



Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016

Dari perbandingan harga, letak geografis, dan sarana pelabuhan di kabupaten/kota tersebut, dapat dijelaskan asal barang pabrikan diperoleh sebagai berikut:

- i. Kabupaten Halmahera Tengah mendapatkan sebagian besar bahan bangunan/konstruksi dari Manado melalui jalur laut menuju Pelabuhan Laut Weda. Selain dari Manado, sebagian bahan bangunan/konstruksi berasal dari Ternate melalui jalur laut menuju pelabuhan Sofifi dan dilanjutkan melalui jalur darat menuju ibukota Halmahera Tengah di Weda. Selain itu ada juga bahan

bangunan/konstruksi yang berasal dari Tobello Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Tidore Kepulauan, melalui jalur darat menuju Weda.

- ii. Kota Tidore Kepulauan mendapatkan sebagian besar bahan/bangunan dari Kota Ternate melalui jalur laut.
- iii. Kabupaten Halmahera Timur mendapatkan sebagian besar bahan bangunan/konstruksi dari Halmahera Utara melalui jalur laut.
- iv. Kota Ternate mendapatkan bahan bangunan/konstruksi dari Surabaya dan Makassar melalui jalur laut. Sebelum bahan bangunan/konstruksi masuk Kota Ternate, kapal barang terlebih dahulu singgah di Kabupaten Halmahera Selatan atau melalui jalur tol laut yaitu singgah di Pulau Morotai dan Halmahere Utara terlebih dahulu.

<http://haltengkab.bps.go.id>

4 LAMPIRAN

<http://haltengkab.bpp.go.id>

4.1 Penghitungan Diagram Timbang IKK 2016

Basket of Construction Component Approach (BOCC)

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selajutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* yaitu:

- a. Gedung Bangunan
- b. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

c. Bangunan Lainnya

Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi Jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan *drainase* irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan viaduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.b.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - a. Pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, *drainase* jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.

- b. Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
- a. Bangunan elektrik, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran *drainase* pada gedung.
 - f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.

- g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Sistem Konstruksi

Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang bisa menjalankan suatu fungsi tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan yang diklasifikasikan kembali kedalam kumpulan komponen bertujuan untuk mendukung bangunan seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan

lainnya. Berikut adalah jenis sistem untuk bangunan rumah dan gedung, dan sistem untuk klasifikasi jenis bangunan lainnya.

Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

- *Site-work* (persiapan) adalah sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
- *Substructure* adalah sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban bagian bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap dan lainnya.
- *Superstructure* adalah Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.
- *Exterior Shell/Building Envelope* adalah Sistem yang berisi komponen konstruksi yang menyelimuti bangunan (atap). Bangunan ini memberi beban pada system superstructure pada bangunan.
- *Interior Partitions* adalah Sistem yang terdiri dari semua dinding, dan bagian bangunan untuk jalan keluar masuk bangunan.
- *Interior and Exterior Finishes* adalah Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang bertujuan untuk memperindah bangunan, misalnya pengecatan.

- *Mechanical and Plumbing* adalah Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang mengatur suhu, saluran air, komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan lainnya.
- *Electrical* adalah Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah bangunan.

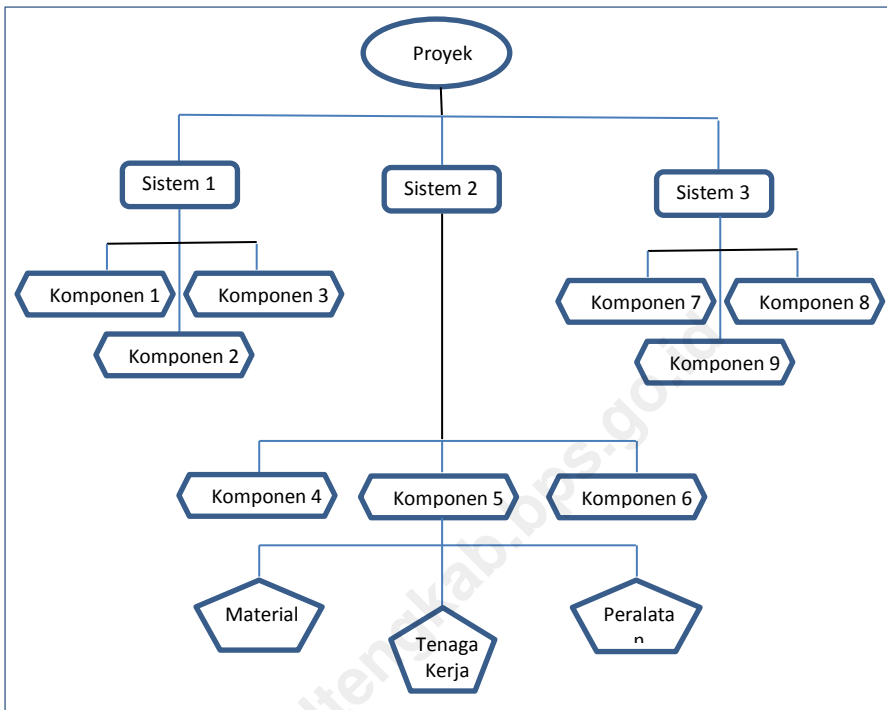
Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Lainnya

- *Site-work* (persiapan) adalah Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
- *Substructure* adalah Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban dari struktur/ bagian bangunan yang berada di atasnya.
- *Superstructure* adalah Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.
- *Mechanical Equipment* adalah Perlengkapan mekanik yang dipasang pada suatu bangunan seperti pompa, turbin, pipa penghubung, tower pendingin, dan lainnya.
- *Electrical Equipment* adalah Peralatan yang terpasang pada bangunan yang digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, pusat kontrol pencahayaan, komunikasi dan lainnya.

- *Underground Utility* adalah Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, saluran pembuangan akhir, dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa, kabel, fiber optic cable, dan lainnya yang terpasang dibawah permukaan tanah.

Komponen Konstruksi

- Komponen adalah kombinasi dari beberapa material pada lokasi akhir yang dapat diidentifikasi secara jelas pada tujuannya dalam sebuah proyek bangunan dan juga sistemnya. Contoh komponen adalah beton, pengecatan eksterior, pengecatan interior, pondasi kolom, dan lainnya. Sebuah komponen secara umum terdiri dari beberapa material, tenaga kerja dan peralatan.

Gambar 3. Hubungan antara proyek, sistem, dan komponen

Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016

Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali kedalam beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item

pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut.

Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK 2013 berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, bangunan umum untuk jatingan air listrik, dan komunikasi) bangunan 3 (bangunan lainnya).

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang, yaitu:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level system konstruksi
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 di kabupaten/kota yang bersangkutan. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar

setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
- b. Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.
- c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.

Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat volume, harga, dan nilai dari beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan.

Contoh pemberian kode pada dokumen BoQ

Komponen	Nilai Proyek	Volume Pekerjaan	Jumlah Harga	Kode Sistem	Kode Barang	Analisis Harga				
						Nama Komoditi	Bobot komponen (Vol)	Satuan	Harga	Nilai
III. PEKERJAAN PASANGAN	-									0
1 Pas.Batu kosong	5,049,453.60	14.88	339,345.00	2	1302 Batu kali		1.2 m3		190,000	228,000
	-			2	Pasir urug		0.432 m3		130,000	56,160
	-			2	5600 Pekerja		0.78 oh		40,000	31,200
	-			2	5300 Tukang batu		0.39 oh		50,000	19,500
	-			2	5200 Kepala tukang batu		0.039 oh		55,000	2,145
	-			2	Mandor		0.039 OH		60,000	2,340
2 Pas.Batu kali 1 : 5 Ps Karung asem	23,424,094.45	39.53	592,565.00	3	1302 Batu kali		1.1 m3		190,000	209,000
	-			3	2000 Semen portland		136 kg		1,200	163,200
	-			3	1201 Pasir pasang ex karang asem		0.544 m3		210,000	114,240
	-			3	5600 Pekerja		1.5 oh		40,000	60,000
	-			3	5300 Tukang batu		0.75 oh		50,000	37,500
	-			3	5200 Kepala tukang batu		0.075 oh		55,000	4,125
	-			3	Mandor		0.075 oh		60,000	4,500

2. Menghitung masing-masing tahapan penimbang setiap kabupaten/kota.

Penimbang untuk penghitungan IKK yang berasal dari data BoQ ada dua jenis penimbang yakni penimbang material dan penimbang system.

Penimbang Material digunakan untuk menghitung PPP bangunan yaitu **share nilai system** dari setiap system yang ada dalam suatu bangunan.

Selain dari data BoQ, penghitungan IKK 2016 juga menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009-2015. Penimbang realisasi APBD digunakan untuk tahap proyek.

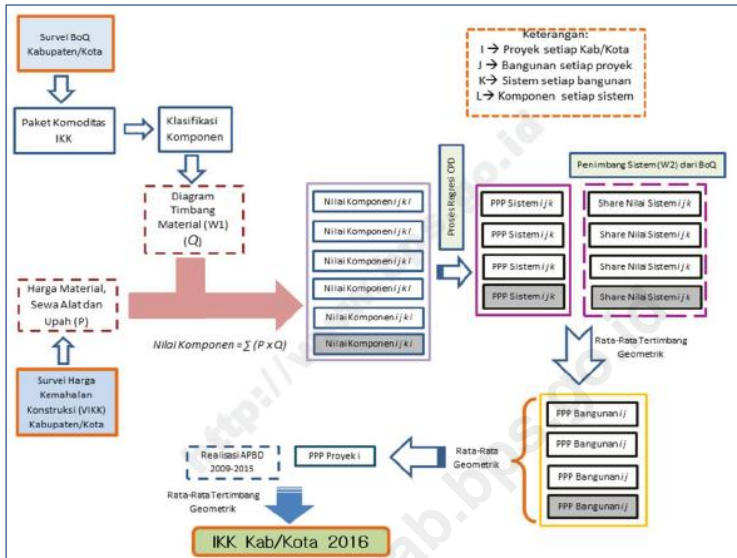
Secara garis besar proses penghitungan IKK 2016 dilalui melalui beberapa tahapan, diantaranya :

1. Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang material dari data BoQ

2. Menghitung nilai komponen yakni rata-rata tertimbang aritmatika antara data harga hasil survei harga kemahalan konstruksi (VIKK) dengan diagram timbang material.
3. Melakukan regresi CPD dari keseluruhan nilai komponen setiap proyek, bangunan, dan system untuk memperoleh PPP sistem.
4. Rata-rata tertimbang aritmatika antara PPP system dengan penimbang system setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan
5. Melakukan rata-rata aritmatika dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP Proyek
6. Melakukan rata-rata tertimbang aritmatika antara PPP Proyek dengan rata-rata data realisasi APBD tahun 2009-2016 untuk memperoleh angka IKK.

Proses penghitungan IKK 2016 secara keseluruhan beserta dengan penggunaan penimbang dapat dilihat di bagan di bawah ini.

Gambar 4. Bagan Proses penghitungan IKK 2015 secara keseluruhan beserta dengan penggunaan penimbang



Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2016

Kuesioner IKK



VIKK2016

BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI SEWA ALAT BERAT, DAN UPAH JASA KONSTRUKSI
DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK

PERIODE : OKTOBER 2016

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
2. Responden adalah **pedagang grosir/distributor** yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/ pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
3. Responden harus berada di Ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari **kualitas yang setara**.
5. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara.
6. Isian kuesioner dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri dari BPS RI. Hasil entri dikirim ke shpb@bps.go.id dengan cc ke BPS Provinsi masing-masing.
7. Dilarang mengubah format file program data entri yang dikirim oleh SHPB.
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacahan dan pemeriksa disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT	
1. Provinsi	
2. Kabupaten / Kota	

BLOK II : KETERANGAN PENCACAH DAN PENGAWAS			
1. Nama Pencacah		6. Nama Pengawas	
2. NIP Pencacah		7. NIP Pengawas	
3. Tanggal Pencacahan	4. Selesai Dientri Tanggal	8. Tanggal Pengawasan	
5. Tanda Tangan Pencacah		9. Tanda Tangan Pengawas	

OKTOBER 2016

PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG GROSIR/ MERKAP ECRAN 4. PEDAGANG ECRAN (HARGA TANYA ONGKOS ANGKUT), UNITS BARANG YANG BERMERK UPAMAKAN MENCAKUP SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, TULIS MERK LAINNYA YANG SETARA.

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan (buah, truk, gantang, ember, rol dll)	Ukuran Satuan Setempat				Konversi Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (kolaborasi)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
Tanah Urug	Biasa	I	m ³			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		II	m ³											
		III	m ³											
Pasir	Pasir Pasang (pasir laut, pasir kali)	I	m ³											
		II	m ³											
		III	m ³											
	Pasir Beton / Cor (pasir gunung)	I	m ³											
		II	m ³											
		III	m ³											
	Batu Kali Utuh	I	m ³											
		II	m ³											
		III	m ³											
Batu Pondasi	Batu Kali Belah	I	m ³											
		II	m ³											
		III	m ³											
	Batu Gunung	I	m ³											
		II	m ³											
		III	m ³											
Batu Bata	Batu Bata Tanah Liat (bata merah)	I			buah									
		II			buah									
		III			buah									
Batako	Batako Berlubang (hollow block)	I			buah									
		II			buah									
		III			buah									
	Batako Tidak Berlubang (solid block)	I			buah									
		II			buah									
		III			buah									

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL														
PRIORITY RESPONDEN: 1 PEDAGANG GROSIR & PRODUKSI 2 PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECRAN 4 PEDAGANG ECRAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BARANG YANG BERMERK UTAMAKAN MENCAKUP SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MERK LAINNYA YANG SETARA.														
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (kus, zak, lembar, roll dll)	Ukuran Satuan Setempat			Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (tokol/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)	
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)						Berat (kg)
Bata Ringan	Celicon atau Hebel	I	m ³	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		II	m ³											
		III	m ³											
Batu Split	Ukuran 1 - 2 cm	I	m ³											
		II	m ³											
		III	m ³											
	Ukuran 2 - 3 cm	I	m ³											
		II	m ³											
		III	m ³											
Ukuran 3 - 4 cm	I	m ³												
	II	m ³												
	III	m ³												
Seng Gelombang	Ukuran (0.02 x 90 x 180) cm	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
	Ukuran (0.03 x 90 x 180) cm	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
Paku	Paku Kayu 2"- 6"	I	kg											
		II	kg											
		III	kg											
	Paku Beton	I	kg											
		II	kg											
		III	kg											
Paku Seng	I	kg												
	II	kg												
	III	kg												

OKTOBER 2016		BLOK III : DATA HARGA MATERIAL											PRIORITY RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR, 2. PRODUSEN, 3. PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECIERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNITUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCAHAI SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.		
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merek	Satuan Standar (buah, tuk, zak, busbar, roll dll)	Ukuran Satuan Setempat				Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (tokol/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)	
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Paku	Paku Triplek	I	kg												
		II	kg												
		III	kg												
Semen Portland TIGA RODA	Portland Composite Cement (PCC) (SNI 15-7064-2004)	I			Zak										
		II			Zak										
		III			Zak										
		I			Zak										
		II			Zak										
Besi Beton (Full) SNI 07-2052-2002	Besi Beton Polos (BJTP 24) Ukuran d=6mm , p=12m	I	batang												
		II	batang												
		III	batang												
		I	batang												
		II	batang												
		III	batang												
		I	batang												
		II	batang												
		III	batang												
		I	batang												
		II	batang												
		III	batang												
Bak Mandi Fiber WALRUS	Ukuran 55 x 55 x 60 cm	I	buah												
		II	buah												
		III	buah												
		I	buah												
		II	buah												

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL														
PRIORITY RESPONDEN 1 PEDAGANG GROSIR & PRODUSEN 2 PEDAGANG ECEAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAAN MENCAKUPI DENGAN PERINGKAT MEREK, JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.														
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (sat. zak, lembar, rol dll)	Ukuran Satuan Setempat				Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (tokolpedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
Bak Mandi Fiber WALRUS	Ukuran 60 x 60 x 60 cm	I	buah		(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		II	buah											
		III	buah											
Kloset TOTO	Ukuran	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
Kloset Duduk Standar (lengkap dengan tabung)	Kloset Jongkok	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
Seng Plat	Seng Plat BJLS 20 L=45	I	m											
		II	m											
		III	m											
Seng Plat	Seng Plat BJLS 20 L=60	I	m											
		II	m											
		III	m											
Pipa PVC WAVIN	AW Ø 1/2" panjang 4 m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
	AW Ø 3/4" panjang 4 m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
AW Ø 1" panjang 4 m	I	batang												
	II	batang												

OKTOBER 2016		BLOK III : DATA HARGA MATERIAL												
PROMIAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERKAP 4.PEDAGANG ECRAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMERK UPAMAKAN MENCAHAI SESUAI DENGAN PERINGKAT MERK. JIKA TIDAK ADA, TULIS MERK LAINNYA YANG SETARA.														
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Situasi Sempit (buah, truk, lembar, roll dll)	Ukuran Satuan Sempit				Konversi Satuan Sempit ke Satuan Standar	Harga per Satuan Sempit (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (tidak pedang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
Pipa PVC WAVIN	AWW Ø 4" panjang 4 m	I	batang											
		II	batang											
		III	batang											
		I	batang											
		II	batang											
Kayu Balok	Kayu Kelas I	I	m ³											
		II	m ³											
		III	m ³											
		I	m ³											
		II	m ³											
Kayu Papan	Kayu Kelas I	I	m ³											
		II	m ³											
		III	m ³											
		I	m ³											
		II	m ³											

OKTOBER 2016		BLOK III : DATA HARGA MATERIAL												PRIORITY RESPONDEN 1 PEDAGANG GROSIR & PRODUSEN		SALAH SATU DARI PEDAGANG GROSIR & PRODUSEN HARUS MELAMPAIKAN HARGA EKERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCAKUP SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.													
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (Beton, dus, zak, lembar, roll dll)	Ukuran Satuan Setempat				Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (toko/pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)															
						panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)																				
Kayu Lapis/Triplek	Triplek 3mm	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)															
		I	lembar																										
		II	lembar																										
	Triplek 4mm	III	lembar																										
		I	lembar																										
		II	lembar																										
	Triplek 6mm	III	lembar																										
		I	lembar																										
		II	lembar																										
	Triplek / Plywood 9mm	III	lembar																										
		I	lembar																										
		II	lembar																										
Cat Emulsi CATYLAC	Triplek / Plywood 12mm	III	lembar																										
		I	25 kg																										
		II	25 kg																										
	Cat Tembok Eksterior	III	25 kg																										
		I	25 kg																										
		II	25 kg																										
	Cat Tembok Interior	III	25 kg																										
		I	20 kg																										
		II	20 kg																										
	Cat Genteng	III	20 kg																										
		I	kg																										
		II	kg																										
Cat Minyak AVIAN	III	kg																											
	I																												
	II																												

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL														
PRIORITY RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERKAKAP ECRAN 4.PEDAGANG ECRAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT), UNITUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCAHAI SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.														
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, tuk, kaskus, lembar, roll dll)	Ukuran Satuan Setempat				Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (tokolpetagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)					
Cat Minyak ALTEX		(13)	(14)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		I	kg											
		II	kg											
Tegel/Keramik MULLA	Keramik Uk. 30 x 30 cm	III	kg											
		I	m ²											
		II	m ²											
	Keramik Uk. 40 x 40 cm	I	m ²											
		II	m ²											
		III	m ²											
Genteng/Atap	Keramik Uk. 30 x 30 cm (warnamotif)	I	m ²											
		II	m ²											
		III	m ²											
	Keramik Uk. 40 x 40 cm (warnamotif)	I	m ²											
		II	m ²											
		III	m ²											
Merk Atap Metal: SAKURA ROOF	Genteng Tanah Liat Tradisional (tloak berglasur)	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
	Genteng Tanah Liat Keramik	I	buah											
		II	buah											
		III	buah											
Merk Atap Metal: SAKURA ROOF	Atap Metal (TIDAK BERPASIR)	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											
	Atap Asbes	I	lembar											
		II	lembar											
		III	lembar											

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL														
PRIORITY RESPONDENT: 1. WHOLESALE TRADER 2. PRODUCER 3. WHOLESALE TRADER/ MERCHANT 4. WHOLESALE TRADER (PRICE WITHOUT TRANSPORTATION COST). UNIT FOR GOODS THAT HAVE A MAIN BRAND TO COVER THE EQUIVALENT BRAND. IF NOT AVAILABLE, OTHER BRANDS THAT ARE EQUIVALENT.														
Jenis Barang	Kualitas Barang	Respondent	Standard Unit	Brand	Unit of Measure (sheet, truck, bundle, board, roll, etc)	Size of Unit of Measure				Conversion of Unit of Measure to Standard Unit	Price per Unit of Measure (Rp)	Price per Standard Unit (Rp)	Respondent Name (photo/trader)	Remarks (other brands, other sizes, etc)
						Length (m)	Width (m)	Height (m)	Weight (kg)					
Kaca	Kaca Polos Bening 3 mm	I	43	15	61	171	69	69	100	111	122	123	14	15
		II												
		III												
		I												
		II												
		III												
		I												
Aspal	Curah Grade 60/70 Lokal	I	ton											
		II	ton											
		III	ton											
	Drum Grade 60/70 (155 kg) Lokal	I	drum											
		II	drum											
		III	drum											
	Curah Grade 60/70 impor	I	ton											
		II	ton											
		III	ton											
	I	drum												
Gypsum	Gypsum Plafon mm	I			lembar									
		II			lembar									
		III			lembar									
	Gypsum List Polos (220 x 11 x 3) cm	I	Batang											
		II	Batang											
JAYABOARD		III	Batang											

OKTOBER 2016		BLOK III : DATA HARGA MATERIAL													PRIORITY RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCAHAI SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.	
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, lembar, roll dll)	Ukuran Satuan Setempat				Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (jika pedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Kabel ETERNA	Kabel NYA Ukuran 1 x 1,5 mm ²	I	m		ROL											
		II	m		ROL											
		III	m		ROL											
	Kabel NYA Ukuran 1 x 2,5 mm ²	I	m		ROL											
		II	m		ROL											
		III	m		ROL											
	Kabel NYM Ukuran 3 x 2,5 mm ²	I	m		ROL											
		II	m		ROL											
		III	m		ROL											
	Kabel NYM Ukuran 3 x 4 mm ²	I	m		ROL											
		II	m		ROL											
		III	m		ROL											
Bahan Bangunan Siap Pasang Dari Kayu Kelas II	Daun Pintu (2m x 1m x 4cm)	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
	Daun Jendela (dengan kaca, ukuran 50 cm x 120 cm)	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
	Kusen Pintu (2 m x 1 m)	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
	Kusen Jendela (50 x 120) cm	I	buah													
Mesin Pompa Air (TANPA OTOMATIS) SHIMIZU		II	buah													
		III	buah													
	Pompa Shallow Pump (kedalaman s.d 7 m)	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL													
PRIORITAS RESPONDER: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG GROSIR/ MERKAP/ CECERAN 4. PEDAGANG ECEHAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BEMERK UTAMAKAN MENCAKUP SESUAI DENGAN FEMKOT MEREK. JIKA TIDAK ADA, TULIS MERK LAINNYA YANG SETARA.													
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (bat, zak, lembar, rol dll)	Ukuran Satuan Setempat				Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Berat (kg)				
Mesin Pompa Air (TANPA OTOMATIS) SHIMZU	Pompa Semi Jet Pump (kedalaman 8-12 m)	I	buah										
		II	buah										
		III	buah										
		I	buah										
	Pompa Jet Pump (kedalaman 13 - 20 m)	II	buah										
		III	buah										
		I	batang										
		II	batang										
Rangka Atap Baja	Profil Canal "C" Tipe C71.075	III	batang										
		I	batang										
		II	batang										
		III	batang										
	Profil "Omega" / Reng Tipe AA	I	batang										
		II	batang										
		III	batang										
		I	batang										
Aluminium ALEXINDO	Profil Kusen Aluminium 3 inci	II	m										
		III	m										
		I	m										
		II	m										
	Aluminium 4 inci	III	m										
		I	m										
		II	m										
		I	lembar										
	Lembaran 0.5 mm panjang 2 m, lebar 1 m	II	lembar										
		III	lembar										
		I	lembar										
		II	lembar										

OKTOBER 2016		BLOK III : DATA HARGA MATERIAL											PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCAHAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.			
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan Setempat (buah, truk, kontainer, lembar, roll dll)	Ukuran Satuan Setempat				Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	Harga per Satuan Setempat (Rp)	Harga per Satuan Standar (Rp)	Nama Responden (tidakpedagang)	Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)		
						panjang (m)	lebar (m)	tinggi (m)	berat (kg)							
Aluminium ALEXINDO	Aluminium Lembaran 1 mm panjang 2 m, lebar 1 m	I	lembar													
		II	lembar													
		III	lembar													
Tangki Air Fiber PENGUIN	Ukuran 350 - 450 liter	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
	Ukuran 500 - 650 liter	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
	Ukuran 1000-1100 liter	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
	Ukuran 2000 - 2200 liter	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
Lampu PHILLIPS	Lampu Pilar 25 W	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
	Lampu Pilar 40 W	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
	Lampu TL Panjang 18 - 20 W	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													
	Lampu SL (TL Pendek) 18 W	I	buah													
		II	buah													
		III	buah													

OKTOBER 2016									
PRIORITAS RESPONDEN: 1. PEDAGANG GROSIR 2. PRODUSEN 3. PEDAGANG GROSIR MERKANGKAT ECEAN 4. PEDAGANG ECEAN HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMERKE ITAMAKAN MENCAKAI SESUAI DENGAN PERINGKAT MERKE. JIKA TIDAK ADA, PILIH MERKE LAINNYA YANG SETARA.									
BLOK III : DATA HARGA MATERIAL									
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Status Standar	Merk	Satuan (Buat, zak, rak, zak, per, rol, dll)	Ukuran Satuan Setempat			Keterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	
Lampu									
PHILLIPS	Lampu SL (TL Pendek) 20 W	I	buah						
		II	buah						
MCB (SPIN 108-1993)	1 Fasa 4 Ampere	III	buah						
		II	buah						
SCHNEIDER	1 Fasa 6 Ampere	III	buah						
		II	buah						
	1 Fasa 10 Ampere	III	buah						
		II	buah						
PENJELASAN PENGISIAN BLOK III									
TAMBAH URUS: PASIR, BATU PONDASI, BATU BELIT									
Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Tuliskan merek pada kolom 5, beri per kecamatan di kolom 10, dan harga per kecamatan pada kolom 12. Jika satuan pencacahan tidak standar (truk, pick up) maka tuliskan panjang, lebar, dan tinggi bak yang terisi kemudian harga yang dicacah per satuan tsb pada kolom 12.									
BATU BATA, BATUKO									
Isikan ukuran batu bata/batako per buah (jauk, panjang, lebar, dan tinggi dalam meter) kemudian tulis harga batu bata per buah pada kolom 12.									
SEMENT PORTLAND, CAT EMULSI									
Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Isikan merek pada kolom 5, beri per kecamatan di kolom 10, dan harga per kecamatan pada kolom 12.									
BESI BETON, PIPA PVC									
Utamakan mencacah merk yang ditentukan. Isikan panjang PIPA/PVC atau BESI BETON pada kolom 7 kemudian harga per batangnya pada kolom 12.									
KATU BELOK, KATU LAMPAH									
Tuliskan jenis kayu pada kolom 5. Satuan standar kayu bakul atau kayu papan adalah m3. Jika pencacahan barang tsb berbeda, tuliskan satuan, panjang, lebar, dan tinggi kayu pada kolom 7-9. Isikan harga kayu per lembar pada kolom 12. Jika kayu per ton maka isikan kolom 11 dengan angka konversi dari ton ke m3 (1ton=.....m3), sedangkan kolom 7-9 dikosongkan. Harga yang dicacah pada kolom 12 adalah harga kayu per ton.									
PENEGASAN PENGACAHAN IKK									
1. PENGACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL (PASIR, BATU PONDASI, BATU BELIT, BATU BATA, BATUKO, AUGEN DIPEROLEHAN DARI PRODUSEN YANG TIDAK BERADA DI BUKOTA KABUPATEN TENGGARA.									
2. PENGACAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL TIDAK HARUS READY STOCK.									
3. PEMILIHAN KUALITAS/SPEKIFIKASI BARANG HARUS SAMA SETAP TRMILANNYA.									
4. UNTUK SEMUA BULI BEBAT PADA BLOK 4, DI KOLOM KETERANGAN TULISKAN APAKAH HASIL SEMA MERUPAKAN HASIL KONVERSI ATAU TIDAK.									

OKTOBER 2016		BLOK IV. DATA SEWA ALAT BERAT DAN UPAH PEKERJA KONSTRUKSI Responden: Jasa Penyewaan Alat Berat (umur alat berat maksimal 8 tahun, tanpa operator dan bahan bakar)				
Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Excavator PC-200	Kapasitas Bucket 0,8 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas Bucket 0,6 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Kapasitas Bucket 0,4 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Bulldozer D-65	Universal Blade (U-Blade)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Straight Blade (S-Blade)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	Bowl Dozer	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Loader (Wheel atau Track)	Kapasitas Bucket 0,8 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Loader (Wheel atau Track)	Kapasitas Bucket 0,6 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	Kapasitas Bucket 0,4 m ³	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
Tandem / Vibrating Roller	8 - 10 ton	II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
Dump Truck	Kapasitas 20 ton (Tronton)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	Kapasitas 12 ton (Engkel)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
Motor Grader	Kapasitas 8 ton (Colt Diesel)	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	≤ 100 HP	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
	> 100 HP	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	

Jenis Barang	Kualitas Barang	Responden	Satuan/Unit (lingkari kode satuan/unit) (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	Nilai Sewa per Satuan/Unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Asphalt Finisher		I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
Generator Set	60 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	40 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
	20 KVA	I	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM		Dinas PU (harga transaksi)	
		II	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
		III	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM			
JASA KONSTRUKSI						
Upah Kepala Tukang		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Tukang Batu		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Tukang Kayu		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Instalasi Listrik		I	Titik		Dinas PU	
		II				
		III				
Upah Pembantu Tukang		I	O-H		Dinas PU	
		II				
		III				

BLOK V : CATATAN	 Oktober 2016 Mengetahui, Kepala BPS Kabupaten / Kota (.....) NIP.
-------------------------	---

Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi 2016

NO	KODE	PROVINSI	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	ACEH	100,14
2	1200	SUMATERA UTARA	102,76
3	1300	SUMATERA BARAT	103,69
4	1400	R I A U	103,49
5	1500	J A M B I	97,99
6	1600	SUMATERA SELATAN	106,15
7	1700	BENGKULU	101,86
8	1800	LAMPUNG	99,40
9	1900	KEP. BANGKA BELITUNG	107,64
10	2100	KEPULAUAN RIAU	125,89
11	3100	DKI JAKARTA	112,48
12	3200	JAWA BARAT	103,79
13	3300	JAWA TENGAH	98,96
14	3400	DI YOGYAKARTA	100,65
15	3500	JAWA TIMUR	101,78
16	3600	BANTEN	103,66
17	5100	B A L I	113,32
18	5200	NUSA TENGGARA BARAT	93,70
19	5300	NUSA TENGGARA TIMUR	99,82

Tabel 3. (Lanjutan)

NO	KODE	PROVINSI	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
20	6100	KALIMANTAN BARAT	117,91
21	6200	KALIMANTAN TENGAH	106,95
22	6300	KALIMANTAN SELATAN	103,55
23	6400	KALIMANTAN TIMUR	117,60
24	6500	KALIMANTAN UTARA	127,99
25	7100	SULAWESI UTARA	111,62
26	7200	SULAWESI TENGAH	95,63
27	7300	SULAWESI SELATAN	99,11
28	7400	SULAWESI TENGGARA	107,98
29	7500	GORONTALO	101,96
30	7600	SULAWESI BARAT	98,39
31	8100	MALUKU	121,76
32	8200	MALUKU UTARA	127,99
33	9100	PAPUA BARAT	146,46
34	9400	PAPUA	239,98

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2016

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1100	NANGROE ACEH DARUSSALAM	
1101	KAB SIMEULUE	98,24
1102	KAB ACEH SINGKIL	92,44
1103	KAB ACEH SELATAN	93,85
1104	KAB ACEH TENGGARA	95,87
1105	KAB ACEH TIMUR	96,00
1106	KAB ACEH TENGAH	95,85
1107	KAB ACEH BARAT	96,02
1108	KAB ACEH BESAR	91,54
1109	KAB PIDIE	91,86
1110	KAB BIREUEN	99,56
1111	KAB ACEH UTARA	104,28
1112	KAB ACEH BARAT DAYA	89,16
1113	KAB GAYO LUES	97,51
1114	KAB ACEH TAMIANG	86,90
1115	KAB NAGAN RAYA	95,24
1116	KAB ACEH JAYA	90,50
1117	KAB BENER MERIAH	94,60
1118	KAB PIDIE JAYA	87,69
1171	KOTA BANDA ACEH	94,57
1172	KOTA SABANG	96,14
1173	KOTA LANGSA	96,25
1174	KOTA LHOKSEUMAWE	101,12
1175	KOTA SUBULUSSALAM	92,79
1200	SUMATERA UTARA	
1201	KAB NIAS	109,31
1202	KAB MANDAILING NATAL	102,62
1203	KAB TAPANULI SELATAN	105,56
1205	KAB TAPANULI UTARA	94,48

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1206	KAB TOBA SAMOSIR	101,53
1207	KAB LABUHAN BATU	99,99
1208	KAB ASAHAN	100,50
1209	KAB SIMALUNGUN	104,89
1210	KAB DAIRI	105,97
1211	KAB KARO	104,20
1212	KAB DELI SERDANG	105,99
1213	KAB LANGKAT	93,93
1214	KAB NIAS SELATAN	103,49
1215	KAB HUMBANG HASUNDUTAN	94,30
1216	KAB PAKPAK BHARAT	97,00
1217	KAB SAMOSIR	109,53
1218	KAB SERDANG BEDAGAI	98,69
1219	KAB BATU BARA	95,68
1220	KAB PADANG LAWAS UTARA	100,83
1221	KAB PADANG LAWAS	108,43
1222	KAB LABUHAN BATU SELATAN	92,84
1223	KAB LABUHAN BATU UTARA	99,81
1271	KOTA SIBOLGA	93,24
1271	KOTA SIBOLGA	93,24
1272	KOTA TANJUNGBALAI	99,44
1273	KOTA PEMATANG SIANTAR	107,37
1274	KOTA TEBING TINGGI	98,19
1275	KOTA MEDAN	98,69
1276	KOTA BINJAI	92,05
1277	KOTA PADANGSIDIMPUAN	97,90
1278	KOTA GUNUNG SITOLI	103,31
1300	SUMATERA BARAT	
1301	KAB KEPULAUAN MENTAWAI	148,28
1302	KAB PESISIR SELATAN	94,50
1303	KAB SOLOK	93,65

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1304	KAB SWL/SIJUNJUNG	94,99
1305	KAB TANAH DATAR	95,27
1306	KAB PADANG PARIAMAN	93,92
1307	KAB AGAM	97,63
1308	KAB LIMA PULUH KOTA	97,33
1309	KAB PASAMAN	89,09
1310	KAB SOLOK SELATAN	96,61
1311	KAB DHARMASRAYA	96,92
1312	KAB PASAMAN BARAT	104,34
1371	KOTA PADANG	97,90
1372	KOTA SOLOK	97,75
1373	KOTA SAWAH LUNTO	96,62
1374	KOTA PADANG PANJANG	94,28
1375	KOTA BUKITTINGGI	94,93
1376	KOTA PAYAKUMBUH	89,76
1377	KOTA PARIAMAN	96,83
1400	R I A U	
1401	KAB KUANTAN SINGINGI	90,03
1402	KAB INDRAGIRI HULU	101,01
1403	KAB INDRAGIRI HILIR	96,63
1404	KAB PELALAWAN	95,41
1405	KAB SIAK	107,11
1406	KAB KAMPAR	93,72
1407	KAB ROKAN HULU	88,58
1408	KAB BENGKALIS	98,74
1409	KAB ROKAN HILIR	102,41
1410	KAB KEPULAUAN MERANTI	105,53
1471	KOTA PEKANBARU	89,57
1472	KOTA DUMAI	104,15

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1500	JAMBI	
1501	KAB KERINCI	87,64
1502	KAB MERANGIN	95,31
1503	KAB SAROLANGUN	96,70
1504	KAB BATANG HARI	88,84
1505	KAB MUARO JAMBI	89,64
1506	KAB TANJUNG JABUNG TIMUR	98,60
1507	KAB TANJUNG JABUNG BARAT	98,06
1508	KAB TEBO	93,89
1509	KAB BUNGO	92,72
1571	KOTA JAMBI	90,96
1572	KOTA SUNGAI PENUH	86,35
1600	SUMATERA SELATAN	
1601	KAB OGAN KOMERING ULU	97,06
1602	KAB OGAN KOMERING ILIR	91,49
1603	KAB MUARA ENIM	95,34
1604	KAB LAHAT	103,01
1605	KAB MUSI RAWAS	103,31
1606	KAB MUSI BANYUASIN	99,80
1607	KAB BANYU ASIN	102,41
1608	KAB OKU SELATAN	87,19
1609	KAB OKU TIMUR	101,49
1610	KAB OGAN ILIR	104,95
1611	KAB EMPAT LAWANG	103,68
1612	KAB PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	103,32
1613	KAB MUSI RAWAS UTARA	102,71
1671	KOTA PALEMBANG	99,75
1672	KOTA PRABUMULIH	103,31
1673	KOTA PAGAR ALAM	99,13

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1674	KOTA LUBUK LINGGAU	107,60
1700	BENGKULU	
1701	KAB BENGKULU SELATAN	93,54
1702	KAB REJANG LEBONG	99,26
1703	KAB BENGKULU UTARA	94,19
1704	KAB KAUR	93,10
1705	KAB SELUMA	94,40
1706	KAB MUKOMUKO	104,06
1707	KAB LEBONG	96,77
1708	KAB KEPAHANG	91,06
1709	KAB BENGKULU TENGAH	95,77
1771	KOTA BENGKULU	99,61
1800	LAMPUNG	
1801	KAB LAMPUNG BARAT	100,42
1802	KAB TANGGAMUS	94,93
1803	KAB LAMPUNG SELATAN	90,00
1804	KAB LAMPUNG TIMUR	88,93
1805	KAB LAMPUNG TENGAH	89,50
1806	KAB LAMPUNG UTARA	91,82
1807	KAB WAY KANAN	94,66
1808	KAB TULANG BAWANG	97,38
1809	KAB PESAWARAN	89,46
1810	KAB PRINGSEWU	91,47
1811	KAB MESUJI	101,01
1812	KAB TULANG BAWANG BARAT	102,44
1813	KAB PESISIR BARAT	100,23
1871	KOTA BANDAR LAMPUNG	88,18
1872	KOTA METRO	89,96

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
1900	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
1901	KAB BANGKA	104,78
1902	KAB BELITUNG	94,78
1903	KAB BANGKA BARAT	106,29
1904	KAB BANGKA TENGAH	103,43
1905	KAB BANGKA SELATAN	105,22
1906	KAB BELITUNG TIMUR	94,15
1971	KOTA PANGKAL PINANG	104,07
2100	KEPULAUAN RIAU	
2101	KAB KARIMUN	113,05
2102	KAB BINTAN	118,10
2103	KAB NATUNA	143,63
2104	KAB LINGGA	91,87
2105	KAB KEP. ANAMBAS	154,26
2171	KOTA BATAM	111,98
2172	KOTA TANJUNG PINANG	110,80
3200	JAWA BARAT	
3201	KAB BOGOR	109,90
3202	KAB SUKABUMI	96,53
3203	KAB CIANJUR	99,82
3204	KAB BANDUNG	108,96
3205	KAB GARUT	102,51
3206	KAB TASIKMALAYA	99,94
3207	KAB CIAMIS	94,97
3208	KAB KUNINGAN	93,51
3209	KAB CIREBON	98,76
3210	KAB MAJALENGKA	100,69

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
3211	KAB SUMEDANG	97,64
3212	KAB INDRAMAYU	97,70
3213	KAB SUBANG	101,52
3214	KAB PURWAKARTA	107,60
3215	KAB KARAWANG	105,88
3216	KAB BEKASI	106,85
3217	KAB BANDUNG BARAT	97,98
3218	KAB PANGANDARAN	95,03
3271	KOTA BOGOR	102,58
3272	KOTA SUKABUMI	100,57
3273	KOTA BANDUNG	108,05
3274	KOTA CIREBON	90,29
3275	KOTA BEKASI	103,45
3276	KOTA DEPOK	111,13
3277	KOTA CIMAHI	103,59
3278	KOTA TASIKMALAYA	94,18
3279	KOTA BANJAR	95,01
3300	JAWA TENGAH	
3301	KAB CILACAP	94,13
3302	KAB BANYUMAS	89,64
3303	KAB PURBALINGGA	95,82
3304	KAB BANJARNEGARA	97,89
3305	KAB KEBUMEN	89,29
3306	KAB PURWOREJO	95,54
3307	KAB WONOSOBO	95,26
3308	KAB MAGELANG	91,96
3309	KAB BOYOLALI	97,14
3310	KAB KLATEN	94,69
3311	KAB SUKOHARJO	100,19
3312	KAB WONOGIRI	97,81

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
3313	KAB KARANGANYAR	99,63
3314	KAB SRAGEN	99,94
3315	KAB GROBOGAN	98,91
3316	KAB BLORA	94,13
3317	KAB REMBANG	101,02
3318	KAB PATI	100,73
3319	KAB KUDUS	92,86
3320	KAB JEPARA	93,47
3321	KAB DEMAK	98,86
3322	KAB SEMARANG	99,42
3323	KAB TEMANGGUNG	99,05
3324	KAB KENDAL	98,90
3325	KAB BATANG	94,14
3326	KAB PEKALONGAN	93,52
3327	KAB PEMALANG	98,04
3328	KAB TEGAL	95,65
3329	KAB BREBES	96,39
3371	KOTA MAGELANG	94,58
3372	KOTA SURAKARTA	99,20
3373	KOTA SALATIGA	95,44
3374	KOTA SEMARANG	97,93
3375	KOTA PEKALONGAN	98,23
3376	KOTA TEGAL	99,80
3400	DI YOGYAKARTA	
3401	KAB KULON PROGO	94,14
3402	KAB BANTUL	96,52
3403	KAB GUNUNG KIDUL	97,10
3404	KAB SLEMAN	93,70
3471	KOTA YOGYAKARTA	93,81

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
3500	JAWA TIMUR	
3501	KAB PACITAN	96,86
3502	KAB PONOROGO	99,47
3503	KAB TRENGGALEK	100,47
3504	KAB TULUNGAGUNG	93,89
3505	KAB BLITAR	93,56
3506	KAB KEDIRI	95,14
3507	KAB MALANG	99,79
3508	KAB LUMAJANG	98,20
3509	KAB JEMBER	94,97
3510	KAB BANYUWANGI	95,38
3511	KAB BONDOWOSO	93,46
3512	KAB SITUBONDO	92,36
3513	KAB PROBOLINGGO	96,53
3514	KAB PASURUAN	97,19
3515	KAB SIDOARJO	102,54
3516	KAB MOJOKERTO	96,37
3517	KAB JOMBANG	96,61
3518	KAB NGANJUK	95,54
3519	KAB MADIUN	98,15
3520	KAB MAGETAN	101,35
3521	KAB NGAWI	102,13
3522	KAB BOJONEGORO	95,98
3523	KAB TUBAN	95,41
3524	KAB LAMONGAN	102,75
3525	KAB GRESIK	98,80
3526	KAB BANGKALAN	102,46
3527	KAB SAMPANG	104,20
3528	KAB PAMEKASAN	102,57
3529	KAB SUMENEP	107,78
3571	KOTA KEDIRI	96,14
3572	KOTA BLITAR	97,31

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
3573	KOTA MALANG	100,64
3574	KOTA PROBOLINGGO	93,59
3575	KOTA PASURUAN	93,05
3576	KOTA MOJOKERTO	92,82
3577	KOTA MADIUN	100,77
3578	KOTA SURABAYA	100,00
3579	KOTA BATU	98,61
3600	BANTEN	
3601	KAB PANDEGLANG	93,57
3602	KAB LEBAK	90,38
3603	KAB TANGERANG	109,05
3604	KAB SERANG	99,31
3671	KOTA TANGERANG	112,04
3672	KOTA CILEGON	93,79
3673	KOTA SERANG	92,87
3674	KOTA TANGERANG SELATAN	109,52
5100	BALI	
5101	KAB JEMBRANA	113,47
5102	KAB TABANAN	111,79
5103	KAB BADUNG	111,09
5104	KAB GIANYAR	105,32
5105	KAB KLUNGKUNG	106,30
5106	KAB BANGLI	110,07
5107	KAB KARANGASEM	109,98
5108	KAB BULELENG	113,74
5171	KOTA DENPASAR	110,11

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
5200	NUSA TENGGARA BARAT	
5201	KAB LOMBOK BARAT	91,05
5202	KAB LOMBOK TENGAH	85,08
5203	KAB LOMBOK TIMUR	85,39
5204	KAB SUMBAWA	87,37
5205	KAB DOMPU	92,07
5206	KAB BIMA	89,60
5207	KAB SUMBAWA BARAT	92,37
5208	KAB LOMBOK UTARA	81,59
5271	KOTA MATARAM	91,11
5272	KOTA BIMA	90,15
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	
5301	KAB SUMBA BARAT	98,55
5302	KAB SUMBA TIMUR	95,64
5303	KAB KUPANG	85,95
5304	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	95,68
5305	KAB TIMOR TENGAH UTARA	89,31
5306	KAB BELU	89,79
5307	KAB ALOR	108,35
5308	KAB LEMBATA	95,90
5309	KAB FLORES TIMUR	99,33
5310	KAB SIKKA	92,51
5311	KAB ENDE	95,47
5312	KAB NGADA	97,27
5313	KAB MANGGARAI	97,92
5314	KAB ROTE NDAO	102,49
5315	KAB MANGGARAI BARAT	95,82
5316	KAB SUMBA TENGAH	98,79
5317	KAB SUMBA BARAT DAYA	98,29
5318	KAB NAGEKEO	99,77

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
5319	KAB MANGGARAI TIMUR	97,94
5320	KAB SABU RAIJUA	111,59
5321	KAB MALAKA	94,30
5371	KOTA KUPANG	86,91
6100	KALIMANTAN BARAT	
6101	KAB SAMBAS	116,96
6102	KAB BENGKAYANG	110,78
6103	KAB LANDAK	111,38
6104	KAB PONTIANAK	114,20
6105	KAB SANGGAU	114,54
6106	KAB KETAPANG	116,72
6107	KAB SINTANG	101,34
6108	KAB KAPUAS HULU	122,15
6109	KAB SEKADAU	109,66
6110	KAB MELAWI	115,41
6111	KAB KAYONG UTARA	109,87
6112	KAB KUBU RAYA	109,99
6171	KOTA PONTIANAK	101,14
6172	KOTA SINGKAWANG	104,52
6200	KALIMANTAN TENGAH	
6201	KAB KOTAWARINGIN BARAT	95,64
6202	KAB KOTAWARINGIN TIMUR	103,86
6203	KAB KAPUAS	94,64
6204	KAB BARITO SELATAN	100,20
6205	KAB BARITO UTARA	97,75
6206	KAB SUKAMARA	105,93
6207	KAB LAMANDAU	99,15
6208	KAB SERUYAN	96,30
6209	KAB KATINGAN	99,73

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
6210	KAB PULANG PISAU	101,69
6211	KAB GUNUNG MAS	104,50
6212	KAB BARITO TIMUR	99,80
6213	KAB MURUNG RAYA	111,63
6271	KOTA PALANGKA RAYA	99,83
6300	KALIMANTAN SELATAN	
6301	KAB TANAH LAUT	94,11
6302	KAB KOTA BARU	95,82
6303	KAB BANJAR	88,97
6304	KAB BARITO KUALA	97,97
6305	KAB TAPIN	95,06
6306	KAB HULU SUNGAI SELATAN	100,25
6307	KAB HULU SUNGAI TENGAH	99,97
6308	KAB HULU SUNGAI UTARA	102,20
6309	KAB TABALONG	98,30
6310	KAB TANAH BUMBU	99,28
6311	KAB BALANGAN	100,64
6371	KOTA BANJARMASIN	99,03
6372	KOTA BANJAR BARU	99,63
6400	KALIMANTAN TIMUR	
6401	KAB PASER	108,46
6402	KAB KUTAI BARAT	105,43
6403	KAB KUTAI KARTANEGARA	105,94
6404	KAB KUTAI TIMUR	111,16
6405	KAB BERAU	102,24
6409	KAB PENAJAM PASER UTARA	106,61
6410	KAB MAHAKAM HULU	132,46
6471	KOTA BALIKPAPAN	110,27
6472	KOTA SAMARINDA	115,87

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
6474	KOTA BONTANG	112,86
6500	KALIMANTAN UTARA	
6501	KAB MALINAU	113,74
6502	KAB BULUNGAN	116,57
6503	KAB TANA TIDUNG	154,97
6504	KAB NUNUKAN	113,84
6571	KOTA TARAKAN	109,34
7100	SULAWESI UTARA	
7101	KAB BOLAANG MONGONDOW	104,12
7102	KAB MINAHASA	105,35
7103	KAB KEPULAUAN SANGIHE	111,99
7104	KAB KEPULAUAN TALAUD	118,57
7105	KAB MINAHASA SELATAN	101,17
7106	KAB MINAHASA UTARA	102,89
7107	KAB BOLAANG MONGONDOW UTARA	101,78
7108	KAB KEP. SIAU TAGOLANDANG BIARO (SITARO)	111,75
7109	KAB MINAHASA TENGGARA	99,90
7110	KAB BOLMONG SELATAN	98,74
7111	KAB BOLMONG TIMUR	103,46
7171	KOTA MANADO	97,82
7172	KOTA BITUNG	108,46
7173	KOTA TOMOHON	111,03
7174	KOTA KOTAMOBAGU	105,63
7200	SULAWESI TENGAH	
7201	KAB BANGGAI KEPULAUAN	102,63
7202	KAB BANGGAI	94,06

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
7203	KAB MOROWALI	99,47
7204	KAB POSO	87,94
7205	KAB DONGGALA	81,10
7206	KAB TOLI-TOLI	96,92
7207	KAB BUOL	98,19
7208	KAB PARIGI MOUTONG	87,10
7209	KAB TOJO UNA-UNA	98,94
7210	KAB SIGI	83,99
7211	KAB BANGGAI LAUT	105,39
7212	KAB MOROWALI UTARA	96,21
7271	KOTA PALU	87,70
7300	SULAWESI SELATAN	
7301	KAB SELAYAR	92,41
7302	KAB BULUKUMBA	91,33
7303	KAB BANTAENG	95,83
7304	KAB JENEPONTO	98,83
7305	KAB TAKALAR	91,29
7306	KAB GOWA	91,44
7307	KAB SINJAI	101,67
7308	KAB MAROS	92,39
7309	KAB PANGKAJENE KEPULAUAN	92,00
7310	KAB BARRU	88,96
7311	KAB BONE	95,85
7312	KAB SOPPENG	94,08
7313	KAB WAJO	96,44
7314	KAB SIDENRENG RAPPANG	96,87
7315	KAB PINRANG	97,23
7316	KAB ENREKANG	99,37
7317	KAB LUWU	97,67
7318	KAB TANA TORAJA	105,35
7322	KAB LUWU UTARA	97,67
7325	KAB LUWU TIMUR	101,54
7326	KAB TORAJA UTARA	104,54

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
7371	KOTA MAKASSAR	97,89
7372	KOTA PAREPARE	92,86
7373	KOTA PALOPO	102,28
7400	SULAWESI TENGGARA	
7401	KAB BUTON	101,91
7402	KAB MUNA	101,81
7403	KAB KONAWE	95,25
7404	KAB KOLAKA	93,21
7405	KAB KONAWE SELATAN	96,33
7406	KAB BOMBANA	101,51
7407	KAB WAKATOBI	111,65
7408	KAB KOLAKA UTARA	102,53
7409	KAB BUTON UTARA	112,53
7410	KAB KONAWE UTARA	98,06
7411	KAB KOLAKA TIMUR	89,94
7412	KAB KONAWE KEPULAUAN	103,01
7413	KAB MUNA BARAT	107,20
7414	KAB BUTON TENGAH	105,55
7415	KAB BUTON SELATAN	111,22
7471	KOTA KENDARI	97,76
7472	KOTA BAU-BAU	107,79
7500	GORONTALO	
7501	KAB BOALEMO	96,01
7502	KAB GORONTALO	95,37
7503	KAB POHUWATO	95,85
7504	KAB BONE BOLANGO	97,06
7505	KAB GORONTALO UTARA	97,98
7571	KOTA GORONTALO	94,57

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
7600	SULAWESI BARAT	
7601	KAB MAJENE	89,61
7602	KAB POLEWALI MAMASA	90,76
7603	KAB MAMASA	102,27
7604	KAB MAMUJU	91,52
7605	KAB MAMUJU UTARA	92,44
7606	KAB MAMUJU TENGAH	90,85
8100	MALUKU	
8101	KAB MALUKU TENGGARA BARAT	117,31
8102	KAB MAKULU TENGGARA	121,27
8103	KAB MALUKU TENGAH	109,24
8104	KAB BURU	111,45
8105	KAB KEPULAUAN ARU	112,65
8106	KAB SERAM BAGIAN BARAT	111,43
8107	KAB SERAM BAGIAN TIMUR	110,65
8108	KAB MALUKU BARAT DAYA	135,99
8109	KAB BURU SELATAN	124,27
8171	KOTA AMBON	110,22
8172	KOTA TUAL	129,16
8200	MALUKU UTARA	
8201	KAB HALMAHERA BARAT	124,06
8202	KAB HALMAHERA TENGAH	126,31
8203	KAB KEPULAUAN SULA	128,94
8204	KAB HALMAHERA SELATAN	111,30
8205	KAB HALMAHERA UTARA	119,53
8206	KAB HALMAHERA TIMUR	128,18
8207	KAB PULAU MOROTAI	109,90
8208	KAB PULAU TALIABU	129,23
8271	KOTA TERNATE	127,35

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
8271	KOTA TIDORE KEPULAUAN	128,11
9100	PAPUA BARAT	
9101	KAB FAK-FAK	144,09
9102	KAB KAIMANA	131,29
9103	KAB TELUK WONDAMA	133,24
9104	KAB TELUK BINTUNI	138,91
9105	KAB MANOKWARI	123,66
9106	KAB SORONG SELATAN	121,55
9107	KAB SORONG	119,68
9108	KAB RAJA AMPAT	138,52
9109	KAB TAMBRAW	175,04
9110	KAB MAYBRAT	146,60
9111	KAB MANOKWARI SELATAN	134,53
9112	KAB PEGUNUNGAN ARFAK	203,96
9171	KOTA SORONG	109,21
9400	PAPUA	
9401	KAB MERAUKE	179,69
9402	KAB JAYAWIJAYA	282,04
9403	KAB JAYAPURA	128,93
9404	KAB NABIRE	152,00
9408	KAB YAPEN WAROPEN	144,48
9409	KAB BIAK NUMFOR	153,00
9410	KAB PANIAI	215,29
9411	KAB PUNCAK JAYA	423,41
9412	KAB MIMIKA	156,16
9413	KAB BOVEN DIGOEL	181,24
9414	KAB MAPPI	190,36
9415	KAB ASMAT	220,75
9416	KAB YAHUKIMO	229,55
9417	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	379,97

Tabel 4. (Lanjutan)

KODE	KABUPATEN/KOTA	IKK
(1)	(2)	(3)
9418	KAB TOLIKARA	351,04
9419	KAB SARMI	200,31
9420	KAB KEEROM	157,21
9426	KAB WAROPEN	154,47
9427	KAB SUPIORI	160,77
9428	KAB MEMBERAMO RAYA	182,07
9429	KAB NDUGA	326,15
9430	KAB LANNY JAYA	325,28
9431	KAB MEMBERAMO TENGAH	392,84
9432	KAB YALIMO	352,28
9433	KAB PUNCAK	454,67
9434	KAB DOGIYAI	204,28
9435	KAB INTAN JAYA	397,57
9436	KAB DEIYAI	218,81
9471	KOTA JAYAPURA	150,07